

Populasi, *One Child Policy* dan Reformasi Cina

Yusnarida Eka Nizmi
Hubungan Internasional, Universitas Riau
eka_nizmi@yahoo.com

Abstract

One child policy has been implemented in 1979 and the effects both negative and positive clearly to women. One child policy is a simple China's economic growth grand strategy that was design to reduce population growth, infrastructure problems, labor and resources. This policy obviously effective in controlling almost all family just to have one child. The problem is that one child policy should be noted just for short term, implemented for giving state to get its economic goals and to socialize the values of small family and not for long term solution. Various critics defense this policy because of its unrespect and harmful for women and also breaking the human rights. This research analyze one child policy and its implications to decline labor ratio which threat economic stability because of aging population. China government needs to be focus on the meaning of growth in holistic and more understand that economic growth is also include better achievements in social politics and economic policy dimension. These dimensions will not be reached if the government keep going its attention only on liberalization and modal accumulation.
Keyword: Population Policy; One Child Policy; Family Planning; Economic Growth.

Abstrak

Sejak One Child Policy diimplementasikan pada tahun 1979, terlihat dengan jelas pengaruh positif dan negatifnya terhadap kaum perempuan. Kebijakan satu anak adalah salah satu bagian sederhana dari grand strategi pertumbuhan ekonomi Cina, yang dirancang untuk membatasi pertumbuhan populasi dan mengurangi tekanan infrastruktur, ketenagakerjaan dan sumberdaya. Kebijakan ini efektif dalam membatasi hampir semua keluarga hanya memiliki satu anak. Masalahnya adalah bahwa kebijakan ini harus dipandang sebagai sebuah program jangka pendek, diimplementasikan untuk memberi negara kesempatan mencapai tujuan-tujuan ekonominya dan membantu mensosialisasikan nilai dari keluarga kecil, dan bukan sebagai solusi jangka panjang untuk tekanan ekonomi. Kritik terhadap kebijakan ini sudah banyak bermunculan, kebijakan ini membahayakan kaum perempuan dan implikasinya melanggar hak asasi manusi. Tulisan ini menganalisa posisi kebijakan satu anak dan implementasinya yang banyak mendapatkan pertentangan dan penurunan rasio tenaga kerja yang pensiun yang dapat mengancam stabilitas ekonomi Cina karena persoalan "aging population". Pemerintah Cina perlu untuk memfokuskan makna pertumbuhan secara holistik dan lebih memahami bahwa pertumbuhan juga mencakup pencapaian yang lebih baik dalam dimensi sosial, politik, dan kebijakan ekonomi. Dimensi-dimensi ini tidak akan dapat dicapai jika pemerintah terus melanjutkan perhatiannya hanya pada liberalisasi dan akumulasi modal.

Kata Kunci: Kebijakan Populasi, Kebijakan satu Anak, Perencanaan Keluarga, Pertumbuhan Ekonomi

Pendahuluan

Kebijakan satu anak pada tahun 1979 menjadi kebijakan yang kontroversial karena dampak kerusakannya terhadap kesehatan perempuan di Cina demikian juga dengan status perempuan dan hak asasi manusia secara umum. Pada awal penerapannya, terjadi seleksi jenis kelamin, pemaksaan aborsi, pembunuhan terhadap janin, dan pemaksaan sterilisasi secara tidak proporsional yang langsung berpengaruh terhadap perempuan dengan meletakkan tanggungjawab pada mereka untuk memiliki anak laki-laki dan konsekwensi yang harus mereka terima jika gagal melakukannya (Bauer et al.1992; Croll 2000; Johnson 1996; Kristof and WuDunn 1994; Milwertz 1997; Summerfield 1994). Namun, tahun-tahun terakhir ini, kebijakannya sudah lebih fleksibel, membolehkan memiliki tambahan anak dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan penggunaan kekerasan untuk menjamin penerapan kebijakan satu anak sudah mulai berkurang.

Ada beberapa kondisi ekonomi yang tidak terduga berkaitan dengan Kebijakan satu anak dialami oleh para perempuan muda, yang tinggal di daerah perkotaan. Beberapa perubahan ini termasuk

meningkatnya kesempatan menempuh pendidikan bagi perempuan dan posisi yang setara dengan kaum pria bagi perempuan yang berstatus sebagai pekerja, dua kondisi ini memberi pengaruh terhadap *human capital investment* bagi para keluarga untuk mendapatkan anak perempuan (Greenhalgh 2001; Hung 1995; Meng 1993; Parish and Busse 2000; White, Howell, and Xiaoyuan 1996).

Pertumbuhan populasi mulai terlihat massif pada tahun 1980an, otoritas pemerintah yang awalnya memberi insentif berubah menjadi menekan masyarakat demi terlaksananya one child policy. Pemberlakuan denda, pembatasan rasio, dan penolakan pendaftaran untuk kelahiran berikutnya (yang berimplikasi pada fasilitas kesehatan, pendidikan dan perumahan) yang dulunya diberikan pada keluarga-keluarga untuk memiliki hanya satu anak saja. Selanjutnya, kelahiran harus benar-benar direncanakan dengan adanya pemberian izin dari otoritas siapa saja yang memiliki hak kelahiran dalam kurun waktu tertentu. Kelahiran diluar izin otoritas tidak diperbolehkan, dan aturan ketat diberlakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap kebijakan satu anak. Shen berpendapat bahwa negara “menjamin kaum perempuan terkait urusan reproduksi dan masalah fertilitas kaum

perempuan menjadi target utamanya” (Shen 2003, 81).

Kekerasan untuk menjamin implementasi kebijakan terus berkembang dari negara atau unit-unit kerja lokal termasuk propaganda melalui All China Women’s Federation, Family Planning unit, Komite Partai Komunis, Youth League, dan Neighborhood Committees. Studi-studi juga mempublikasikan kajian ilmiah demi mempromosikan kelahiran satu anak saja dan membatasi jumlah kelahiran anak.

Kerangka Pemikiran

One child policy lebih dari sekedar sebuah mekanisme dalam mengontrol populasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjamin pertumbuhan ekonomi, dan jelas sekali memiliki implikasi jender yang memberi beban yang lebih besar pada kaum perempuan untuk perencanaan keluarga dan minimnya kontrol reproduksi yang memberikan jaminan kepada kaum perempuan. Kebijakan ini hanya berorientasi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dengan membatasi pertumbuhan penduduk. Secara keseluruhan level pertumbuhan di Cina mengacu pada keefektifan kebijakan dibanding pada

implementasi. “pertumbuhan” diidentikkan sebagai modernisasi, fokus pada liberalisasi Barat yang semuanya diukur dengan kaca mata pertumbuhan dan kemajuan dalam sektor ekonomi. Meskipun kata modernisasi itu sendiri mendapat banyak kritikan dari para sarjana yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan adalah sesuatu yang kompleks lebih dari sekedar mengukur indeks GDP.

Cina menjadi negara yang lebih makmur, penuh dengan denda dan mengambil keuntungan dari pelaksanaan hukuman-hukuman yang berkaitan dengan kekayaan, bagi siapa yang melanggar kebijakan tersebut. Keinginan pemerintah untuk menjamin adanya sejumlah pengecualian terhadap aturan kepemilikan satu anak, mengindikasikan menurunnya kebutuhan dan peran sesungguhnya dari kebijakan ini. Kelanjutan implementasi kebijakan tidak sesuai dengan adanya tuntutan yang ditujukan pada negara untuk memberikan fasilitas dana pensiun yang memadai atau sistem pensium dan mengelola aging population yang terus meningkat.

Faktanya, kebijakan satu anak membuat masalah-masalah ini lebih sulit untuk dipecahkan dengan rendahnya jumlah angka pekerja dibanding rasio

jumlah yang pensiun, dan tingginya beban ekonomi orang tua yang pensiun dibebankan kepada anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Kebijakan ini justru tidak memberi makna “pertumbuhan” yang sesungguhnya bagi negara dalam jangka panjang.

Pembahasan

Awal Reformasi Populasi Dalam Sejarah Cina

Kebijakan-kebijakan untuk mengontrol populasi di Cina bahkan sudah dimulai sebelum berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949 dan menurut beberapa sarjana (Himes 1936; Kane 1985; Tien 1965; Zhao) sudah dimulai sejak 2000 tahun yang lalu. Selama era Komunis, ketakutan terhadap tingginya pertumbuhan populasi mulai terjadi dan pemerintah berusaha untuk membedung terjadinya asumsi-asumsi Malthusian terhadap ketidakseimbangan demografi. Meskipun kebijakan-kebijakan pronatalist diadopsi oleh negara di awal tahun 1950an, tekanan populasi mulai bergerak dengan cepat dan dimulailah perubahan arah kebijakan dari yang awalnya mendukung pertumbuhan populasi berganti menjadi membatasi pertumbuhan populasi.

Tingginya angka fertilitas dan tingginya populasi membendung pertumbuhan di Cina, dan negara khawatir mengenai kemampuannya untuk memberi makan populasi. Kemudian pada pertengahan tahun 1950an, beberapa upaya dibuat untuk mengatasi pertumbuhan populasi dengan kampanye “perencanaan keluarga” yang dilakukan diseluruh wilayah Cina, memberi pengarahan pada kaum perempuan untuk mengurangi angka keluarga. kebijakan-kebijakan ini sangat kontras pada awal 1950an, dimana negara mengadopsi pronatalis dan melarang perempuan mengontrol angka kelahiran. Dari tahun 1957 sampai dengan 1973, fertilitas menurun dari 6.21 persen menjadi 4.51 anak per perempuan di Cina dan lebih berkembang di wilayah perkotaan seperti Beijing dimana angka penurunannya jauh lebih drastis yakni dari 6.07 menjadi 2.55 anak per perempuan (Scharping 2003, 267).

Pada tahun 1970an ada tekanan terhadap pemerintah untuk memperhatikan persoalan lingkungan akibat pertumbuhan yang terjadi, dari dunia internasional yang ditujukan kepada negara-negara berkembang dengan populasi yang tinggi. Meskipun pertumbuhan terjadi melalui transisi demografi yang diharapkan mampu memompa tingkat kesejahteraan

ekonomi negara-negara berkembang, tekanan yang diberikan terhadap negara-negara berkembang seperti tidak proporsional dengan membatasi pertumbuhan populasi. Kebijakan satu anak muncul dalam konteks trend ini yakni adanya tekanan dunia internasional dan domestik, dimana kondisi sosial ditempatkan pada posisi kedua dibanding pertumbuhan ekonomi. Hershatter (2007) mengungkapkan bahwa, “pemerintah berasumsi jika tidak diambil langkah drastis untuk membatasi angka fertilitas, kebutuhan populasi yang begitu besar tidak akan bisa diakomodir, strategi pertumbuhan nasional akan mengalami kemunduruan dan akan berakibat pada munculnya beragam penderitaan (Potter 1985; Croll 1985, Tien 1985, 1987; Bianco and Hua 1988; Potter and Potter 1990; Greenhalgh 2003)”

Pada tahun 1978 Deng Xiaoping merevisi hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan angka kelahiran dan mulai melakukan reformasi yang secara fundamental merubah ekonomi Cina (Chinese Government White paper 1995, 386). *One Child Policy* (1979) menjadi target utama terkait dengan populasi dan mengarahkan semua keluarga untuk membatasi kelahiran

satu anak saja, disertai adanya penawaran beragam insentif untuk pelaksanaannya.

Di Beijing, pemberian insentif termasuk bonus 60 Yuan pertahun sampai anak berusia empat belas tahun dan mereka juga difasilitasi kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan. Pada tahun 1982 tujuan nasional untuk mengurangi angka fertilitas menembus angka 1.7 anak per perempuan, (Ching 1982, 209), angka nya terus berubah mencapai 1.6 pada pertengahan tahun 1980-an dan turun menjadi 1.3 untuk wilayah-wilayah seperti Beijing, Shanghai, dan Tianjin (Attane 2001, 110). Pada pertengahan tahun 1980-an, terlihat jelas perbedaan implementasi lokal, dengan propinsi-propinsi yang memberikan penawaran insentif dan hukuman yang berbeda-beda dalam pemberlakuan kebijakan. Meskipun banyak dari target populasi dan pemberlakuan kebijakan sudah dimulai pada tahun 1970an, namun pengaruhnya belum terlihat sampai dengan tahun 1980an.

Beberapa aturan dibuat oleh otoritas lokal atau unit-unit kerja untuk menjamin perencanaan kelahiran termasuk mandat penggunaan alat-alat kontrasepsi, kontrol kelahiran dan pemeriksaan menstruasi, memaksa aborsi jika terjadi pelanggaran,

pemaksaan untuk sterilisasi. Dalam konteks ini, jelas perempuan diperlakukan secara tidak proporsional dengan pemberlakuan beragam hukum tersebut, dan terjadi 4 dari lima juta operasi (laki-laki dan perempuan untuk disterilisasi, aborsi dan pemasangan atau pelepasan alat kontrasepsi IUD) terjadi dari tahun 1971 sampai dengan 2001, 95 persen dilakukan pada perempuan,” dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya (Greenhalgh and Winckler 2006, 256).

Pembatasan kelahiran anak telah menciptakan persoalan gender, ketimpangan rasio jenis kelamin. Sejak pemberlakuan kebijakan satu anak, rasio jenis kelamin dilaporkan mencapai 145 anak laki-laki per 100 anak perempuan di wilayah-wilayah seperti Propinsi Shaanxi (Shen 2003, 81), dan terjadi peningkatan pembunuhan janin di keluarga-keluarga setelah mengetahui jenis kelamin janin yang diperoleh dari kemajuan teknologi. Rasio jenis kelamin yang normal berkisar 100 anak laki-laki per 100 anak perempuan, jumlah rasion di Cina menunjukkan penyimpangan yang terlalu tinggi akibat adanya seleksi jenis kelamin. Adanya keyakinan bahwa anak laki-laki lebih berharga dibanding anak perempuan, maka banyak ditemukan “ alokasi

pertukaran anak perempuan yang dianggap “tidak berguna”.

Untuk mengatasi kepercayaan konvensional ini, maka keluarga-keluarga diberikan pemahaman bahwa anak perempuan sama berharganya dengan anak laki dengan cara merancang undang-undang yang menempatkan posisi perempuan setara dalam perkawinan dan undang-undang kepemilikan properti. “Penggunaan mesin ultrasound B, yang dipakai untuk mengetahui kehamilan dan memeriksa pemasangan IUD”, dilarang penggunaannya untuk mendeteksi jenis kelamin (Scharping 2003, 226). Meskipun upaya-upaya ini sudah dilakukan, ketimpangan jenis kelamin yang ada menunjukkan ada sekitar 30 juta anak perempuan “ yang hilang” saat ini di Cina akibat dari ketatnya pemberlakuan kebijakan satu anak Seager 2003, 40).

Pada tahun 1984, banyak persoalan yang muncul dan banyak pasangan tidak yakin dengan tingginya biaya yang harus mereka keluarkan untuk melanggar kebijakan tersebut. Untuk mengatasi persoalan ini, negara memberlakukan pengecualian, yakni memperbolehkan pasangan-pasangan untuk memiliki lebih dari satu anak. Pengecualian ini diberikan kepada: orang tua yang memiliki anak

cacat, pasangan yang tidak memiliki saudara selain anak-anak, pasangan yang anak pertamanya adalah perempuan, etnis minoritas, diizinkan untuk memiliki anak kedua jika rentang waktu kelahiran sudah sampai sesuai dengan aturan pemerintah, dan jika orangtuanya pernah memiliki pengalaman yang berat jika hanya memiliki satu anak saja (Attane 2001; Attane 2002; Hesketh, Li, and Zhu 2005; Liang and Li 2006; Shen 2003; Short and Zhai 1998).

Pengecualian-pengecualian ini tidak berarti bahwa implementasi kebijakan satu anak menjadi lebih lunak dalam hal aborsi, sterilisasi dan metode “pengontrolan” kelahiran. Modifikasi-modifikasi ini, bahkan pada awal 199-an menunjukkan angka penurunan 62.9 persen populasi jika dibandingkan pada tahun 1960an (Correa 1994, 16). Akibatnya, angka fertilitas Cina 2.8 anak per perempuan pada tahun 1979 menjadi 1.11 anak per perempuan selama kurun waktu yang sama (Scharping 2003, 267).⁷ Motivasi ekonomi dibalik kebijakan mengontrol populasi untuk membatasi pertumbuhan populasi demi mendapatkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi jelas terlihat, dan kelanjutan implementasi kebijakan adalah upaya untuk menutupi tujuan sebenarnya dari negara.

Perempuan dan Kebijakan *One Child Policy*

Kebijakan kontrol populasi dapat juga dihubungkan dengan beberapa perubahan lain yang ditujukan pada perempuan baik dalam sektor publik maupun privat. Pertama, pemerintah berasumsi bahwa kebijakan satu anak membantu membebaskan perempuan daerah perkotaan “karena negara mengambil alih kontrol keluarga dan suami, “dalam mengambil keputusan mengenai reproduksi (Greenhalgh 2001, 869). Pada dasarnya, ini bukanlah pembebasan, ketika perempuan justru dikontrol kesehatan tubuh dan reproduksinya, namun mengurangi beban melahirkan yang tak berhenti yang selama ini ditujukan pada perempuan.

Dengan adanya pembatasan kelahiran, perempuan tidak diizinkan untuk melanjutkan memiliki anak setelah mereka memiliki seorang anak laki-laki. Fakta bahwa 30 juta anak perempuan “hilang” di Cina masih menjadi persoalan yang tak terpecahkan, akibat dari bertahun-tahun implementasi kebijakan yang sangat ketat. Perbedaan harus dibuat antara periode penegakan kebijakan pada tahun 1980an, yang berkontribusi terhadap

hilangnya sejumlah anak perempuan saat ini, dan beberapa tahun terakhir ketika implementasi kebijakan ini sedikit melunak.

Jenis kelamin anak laki-laki masih menjadi patokan utama yang bernilai lebih bagi kaum pedesaan. Sementara bagi penduduk perkotaan perburuan untuk mendapatkan anak laki-laki tidak terlalu menjadi prioritas, karena mayoritas populasi Cina tinggal di pedesaan, maka jumlah anak-anak perempuan yang hilang jauh lebih besar ketika dikalkulasikan dengan jumlah anak secara keseluruhan di Cina, termasuk juga dengan propinsi-propinsi tertentu dimana jumlah populasi pedesaannya tergolong besar. Argumen Greenhalgh terkait dengan kebebasan reproduksi harus dipahami dalam konteks ini. Fakta bahwa pilihan-pilihan individu diambil alih oleh negara dan bahwa keinginan-keinginan individu untuk memiliki anak lebih dari satu ada di masyarakat Cina baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan.

Meskipun keluarga-keluarga yang ada di Cina menjadi harus beradaptasi dengan segala aturan mengenai pembatasan anak dan fokus terhadap “hanya pada mendapatkan anak yang sempurna” energi dan keuangan keluarga

pada dasarnya justru habis terkuras untuk pengembangan anak dibanding persoalan jenis kelamin (Milwertz 1997, 122).⁹ Zhang, Feng, dan Zhang (2006) seperti yang banyak ditemui bahwa banyak pasangan yang semakin meningkat tidak terlalu berkeinginan untuk memiliki anak laki-laki, dan dalam beberapa kasus, anak perempuan lebih diinginkan (2006, 103).

Karena keluarga-keluarga di Cina berinvestasi lebih pada anak mereka satu-satunya, ini membuka peluang dalam bidang pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan-perempuan muda. Kedua, perubahan pasar yang banyak menyediakan peluang pekerjaan yang ditujukan bagi perempuan-perempuan muda. Meskipun lowongan-lowongan pekerjaan ini lebih memfokuskan pada penampilan fisik dibanding keahlian, fenomena ini menghasilkan sebuah generasi dimana kaum perempuan menjadi sangat percaya diri secara sosial (Greenhalgh dan Winckler 2005; Zhang Zhen 2001). Fenomena ini juga memberi harapan yang lebih terhadap perempuan muda Cina untuk memiliki motivasi karena adanya penghargaan terhadap posisi mereka di masyarakat.

Keinginan untuk memiliki anak laki-laki dibanding anak perempuan mengalami

perubahan di daerah perkotaan. Dan beberapa peneliti menemukan di kota-kota yang lebih besar seperti Beijing dan Shanghai, tingkat kepuasan memiliki anak perempuan sama tingginya dengan tingkat kepuasan memiliki anak laki-laki ((Scharping 2003; Shanor and Shanor 1995). Tulisan ini juga menemukan bahwa perempuan-perempuan Beijing pada tahun 2001-2002 memiliki perkembangan pola pikir, dimana jenis kelamin menjadi kurang begitu penting dan kehadiran anak perempuan diinginkan sama halnya dengan kehadiran anak laki-laki. Perempuan Beijing mengungkapkan “ ketika anak-anak tumbuh mereka diharapkan untuk dapat memelihara orang tua. Satu anak berarti satu kesempatan” Scharping 2003; Shanor and Shanor 1995).

Asumsi bahwa jika anda hanya memiliki seorang anak baik itu laki-laki maupun perempuan akan memberi manfaat selama anda melakukan investasi yang tepat dalam pendidikannya dan peluang-peluang yang tepat untuk kehidupannya kelak. Meskipun secara tradisional anak laki-laki bertanggung jawab memelihara dan merawat orang tua mereka saat usia tua, kebijakan satu anak memaksa orang tua untuk melihat anak-anak perempuan mereka sebagai bagian dari jaminan keamanan saat usia tua mereka nanti. Para

keluarga kemudian melakukan investasi terbaik untuk masa depan anak-anak mereka, dan jenis kelamin menjadi kurang relevan lagi untuk situasi seperti ini.

Terjadi perubahan terhadap pemikiran mengenai kehadiran anak laki-laki, hal lain yang juga muncul akibat dampak dari kebijakan satu anak adalah semakin sedikit anak yang dimiliki per keluarga berarti para perempuan yang bekerja akan menghabiskan lebih sedikit waktu terhadap perkembangan dan perawatan anak dan hal ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang lebih produktif dalam ruang pekerjaan atau dapat dianggap sebagai berkurangnya beban dalam sektor privat ((Kerr and Delahanty 1996, 37). Ibu rumah tangga yang Full-time jarang ada dalam konteks masyarakat Cina, dimana hampir semua perempuan bekerja diluar rumah, sedikit anak berarti perempuan dalam memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengejar kepentingannya dan untuk memilih pekerjaan yang ada di pasar kerja ((Brinton, Lee, dan Parish 1995, 1,100).

Tekanan pekerjaan sudah cukup tinggi bagi perempuan Cina, tuntutan domestik yang lebih sedikit merubah bagaimana kaum perempuan mengalokasikan waktu mereka. Dengan lebih sedikit beban, kaum perempuan bisa

memiliki waktu lebih untuk pengembangan karir mereka ((Perry 1998, 280). Kebijakan satu anak juga mentransfer kewajiban pemeliharaan anak terhadap nenek-kakek mereka, “yang lebih memudahkan para ibu muda untuk tetap bekerja” (Parish and Busse 2000, 214). Kakek-nenek menjadi aktor yang relevan untuk menjaga cucu mereka karena mereka juga menyesuaikan gaya hidup dan tempat tinggal mereka untuk merespon kebutuhan keluarga mereka, sebagai refleksi perubahan sosial lintas generasi yang berbeda (Chen 2005, 143). Perempuan muda yang bekerja tidak harus bergegas pulang kerumah untuk merawat anak-anak mereka karena adanya kontribusi orang tua mereka dalam penjagaan anak, sehingga memberikan para perempuan jam lebih untuk beraktivitas dalam pekerjaan. Kebijakan ini juga memberikan lebih banyak pilihan kepada kaum perempuan bagaimana mereka berinvestasi dalam dunia kerja termasuk juga dalam waktu santai mereka.

Situasi sosial dan ekonomi yang tidak diinginkan akibat dari kebijakan ini, sudah dipaparkan dan tidak boleh menjadi kesalahan selanjutnya karena ingin memperkuat implementasi kebijakan ini dimanapun juga. Demikian juga dengan “keuntungan” apapun yang didapat dari

kebijakan ini, harus dipahami sebagai sesuatu yang justru tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah untuk menjamin status perempuan. Perlu dicatat bahwa keberhasilan ekonomi disini lebih ditujukan kepada perempuan perkotaan, dan harus dianalisa pada konteks yang tepat.

Meskipun kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap status ekonomi perempuan di wilayah perkotaan, dampak negatif dari kebijakan ini juga cukup banyak: menjadikan mereka menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap kontrol kelahiran, dan menghukum mereka jika tidak mampu membatasi kelahiran hanya untuk satu anak saja. Kebijakan satu anak memberikan beban pada kaum perempuan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dan masyarakat kelas kedua, dimana negara mengontrol dan memanfaatkan mereka untuk pencapaian tujuan ekonomi jangka panjang.

Tantangan Kontemporer Reformasi Cina

Menganalisa perbedaan reformasi yang berlangsung selama lebih dari 28 tahun, tantangan kontemporer yang dihadapi Cina tidak dapat diidentifikasi

sebagai sekedar masalah populasi yang sederhana dan selesai dengan kebijakan satu anak, karena mereka berkaitan dengan masalah distribusi. Satu tantangan terbesar bagi negara adalah menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang terus meningkat dari populasi yang semakin berkembang, yang merupakan imbas dari reformasi ekonomi. Janji bahwa akan ada efek trickle down tidak cukup menenangkan generasi baru Cina yang merasakan reformasi Deng Xiaoping dengan slogannya “to get rich is glorious”.

Kritik terhadap kebijakan satu anak banyak bermunculan, namun meskipun demikian, negara tetap melanjutkan modernisasi dibanding memperhatikan hak-hak atau kepentingan perempuan, dan kebijakan ini tetap akan memberi pengaruh di masa yang akan datang. Meskipun demikian, beberapa masalah ekonomi dan sosial muncul akibat kebijakan satu anak ini. Tingkat ketidaksetaraan dan tantangan restrukturisasi tenaga kerja memunculkan banyak pertanyaan mengenai kemampuan negara untuk mempertahankan keadaan dan langkah reformasi. Sudah banyak bukti dimana kegelisahan sosial dan protes-protes yang bermunculan diseluruh Cina, menunjukkan adanya persoalan distribusi ekonomi yang dihadapi oleh negara (Currier 2005; Howell 2000; Hurst and

O'Brien 2001; Perry 1995; Tang and Parish 2000). Meskipun kegelisahan ini dipandang sebagai tantangan ekonomi, masalah-masalah yang sudah disebutkan diatas memiliki dampak ekonomi dan sosial. Ketika negara mencoba untuk mengatasi kegelisahan yang terus berkembang di masyarakat, tekanan muncul terkait dengan masalah-masalah sumberdaya dan tenaga kerja akibat reformasi yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan satu anak relevan terhadap isu-isu ketidaksetaraan dan masalah-masalah perumahan yang semakin diperburuk dengan kelanjutan implementasi kebijakan ini. Rasio para pekerja yang pensiun semakin memperberat beban keuangan pada generasi yang lebih muda, pasangan-pasangan yang berjuang dengan masalah 4-2-1, dan beragam persoalan implementasi kebijakan yang terus memperbesar ketidaksetaraan kekayaan dan hak istimewa kepada kelas-kelas atas masyarakat perkotaan. Masing-masing dari masalah ini menjadi tekanan bagi negara karena ketimpangan ekonomi saat terus mempertahankan janji-janji ekonomi yang akan didapat dibawah reformasi. Untuk memahami perubahan yang muncul, perlu untuk menganalisa bagaiman Cina secara keseluruhan melakukan pendekatan

reformasi dan bagaimana negara melihat perannya dalam proses tersebut.

Salah satu kekuatan dari sistem Cina adalah mengontrol reformasi dan mengadopsi kebijakan secara gradual. Perubahan yang tidak diinginkan dihindari dengan pengaturan proses reformasi yang ketat oleh negara, meskipun kontrol yang sama tidak lagi berlangsung lama dibawah perencanaan ekonomi. Ketika muncul masalah, negara berusaha untuk memperbaikinya sebelum berkembang ke tahapan selanjutnya, atau membiarkan wilayah lain mengadopsi kebijakan-kebijakan yang sama, reformasi yang berlangsung lambat dan penuh kalkulasi, melibatkan sedikit sekali peran negara di setiap tahapannya. Strategi ini dapat dilihat bagaimana negara menangani kebijakan satu anak. Seperti halnya reformasi ekonomi, kebijakan diimplementasikan secara tidak berimbang, dimana ada kondisi-kondisi berbeda di daerah pedesaan dan wilayah perkotaan serta antar propinsi.

Liberalisasi yang muncul dalam terminologi kebijakan sosial beriringan dengan proses reformasi ekonomi, menunjukkan sinyal bahwa “ Cina menghadapi peningkatan ketidakmampuannya untuk mengontrol

“kehidupan pribadi” pasangan-paangan di Cina (Attane, 2001, 86-87). Cina memang telah melarang pencarian izin dari otoritas loal perencanaan kelahiran untuk memiliki (Hesketh, Li, and Zhu 2005, 1,175). Karena itu negara terus merasa berkepentingan untuk mengatur ruang pribadi warganya dan fokus terhadap penyediaan kebutuhan ekonomi warganya dalam sektor publik, karena semakin sulit untuk memenuhinya seperti halnya privatisasi.

Banyak pasangan merasa bahwa anak adalah sebuah investasi dalam ekonomi mereka untuk menjamin keberlangsungan kehidupan sosial mereka. Selanjutnya, dapat ditebak- para keluarga menginvestasikan lebih waktu dan uang mereka demi mendapatkan anak semata wayang yang sempurna dan memiliki anak lebih dari satu menjadi tantangan finansial bagi seluruh pasangan (Attane 2001; Hesketh, Li, and Zhu 2005; Mcloughlin 2005; Tsui and Rich 2002). Kursus olah raga, musik, setelah sekolah formal, atau FasTracKids progam menjadi bagian sehari-hari bagi anak-anak perkotaan Cina dan para keluarga dengan cepat menyadari mereka tidak memiliki kemampuan untuk menambah anak.

Para perempuan Beijing yang memiliki satu anak mengungkapkan, meskipun tidak ada kebijakan satu anak, secara umum mereka memang menginginkan jumlah anak yang sedikit (Hesketh, Li, and Zhu 2005). Dalam kasus Beijing, perempuan-perempuan dipengaruhi oleh waktu dan uang. Dilema kepemilikan rumah yang layak juga menjadi problem di tempat-tempat seperti Beijing,hanor, seperti yang dikemukakan oleh Shanor dan Shanor, “ alasan yang paling utama bagi pasangan di perkotaan untuk hanya memiliki satu orang anak saja adalah ketidakmampuan memilik rumah yang layak” (1995, 47). Saat ini, bagi kehidupan masyarakat perkotaan tidak tepat untuk memiliki keluarga besar, kaum perempuan mungkin saja ingin memiliki anak banyak, namun situasi ekonomi mereka membatasi kemungkinan ini.

Perempuan muda dituntut untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan rumah mereka, dengan adanya perempuan yang lebih tua mengurus anak mereka, beban keuangan perempuan muda juga semakin meningkat sebagai konsekwensi mengurus cucu. Dalam kasus ini, negara diuntungkan dari kelompok tenaga kerja perempuan yang fokus pada perkembangan karirnya dan memutuskan untuk lebih memprioritaskan produksi

ekonomi dan kelompok perempuan yang lebih tua menjadi “dipekerjakan kembali” sebagai pengasuh cucu.

Negara tidak merasa terpaksa untuk menyediakan fasilitas anak, dan kelompok yang lebih tua dipaksa untuk pensiun lebih awal, sementara kelompok yang lebih muda aktif di pekerjaan untuk mendukung sistem keuangan. Daripada menyediakan lebih banyak lowongan pekerjaan, fasilitas perawatan anak, atau skema perumahan yang mudah untuk dimiliki, negara justru menggunakan kebijakan satu anak sebagai sebuah pembenahan sementara dan menunda tuntutan-tuntutan tersebut. Bagi mereka yang memilih untuk memiliki anak lebih dari satu, hukuman ekonomi yang digunakan terkait dengan subsidi atau akses kepada layanan publik, juga mulai dirasakan berkurang karena menurunnya kemampuan negara, dan kekerasan fisik tidak lagi bisa ditolerir baik pada level lokal maupun komunitas internasional. Ketidaksetaraan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi sangat lebar akibat adanya marketisasi (Khan et al. 1993; Knight and Song 1999; Lu and Sit 2001; Meng 2000; Riskin, Zhao, and Li 2001; Y. Wang 1995; S. Wang and Hu 1999; Yang 1999; W. Zhang 2000).

Privatisasi memberi ruang kelompok kaya atau yang memiliki sumberdaya penuh untuk mengambil manfaat dari peluang yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan privat demi menjamin anak-anak mereka mendapatkan akses sekolah atau perawatan kesehatan dengan kualitas yang jauh lebih baik dari yang ditawarkan oleh pemerintah. negara berusaha untuk mengembangkan rencana menghukum pihak-pihak yang bermain dalam sektor privat, namun ketidakmampuannya dalam menegakkan hukuman menunjukkan bagaimana lemahnya kontrol negara dalam sektor privat. Satu usulan proposal pernah diajukan mengenai hukuman denda yang lebih berat kepada para pemain . Pemain sektor privat dengan denda ratusan bahkan ribuan dollar, mencatat nama atau kantor mereka dalam “record buruk” dan mendiskualifikasi mereka dari penghargaan apapun (Guan 2007). Namun denda ini tidak diterapkan secara reguler (Short and Zhai 1998, 380).

Negara bergarumentasi bahwa kebijakan satu anak perlu untuk mengurangi tekanan ketersediaan pasar kerja dan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Modernisasi negara yang menjadi tujuan awal semakin sulit untuk dipenuhi karena kebijakan satu anak juga mengurangi tenaga kerja untuk

pensiun lebih awal dan menempatkan tekanan yang lebih besar pada negara untuk menjamin keamanan kehidupan sosial sebagai potret populasi baru. Secara tradisional anak-anak difasilitasi keamanan sosial, dan liberalisasi ekonomi dan privatisasi yang diusung oleh negara, menjadi tantangan tersendiri bagi negara bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa mengadopsi kebijakan yang lebih represif.

Tantangan keamanan sosial dengan membatasi kelahiran anak bukanlah sebuah penemuan baru yang harusnya sudah diketahui oleh negara sejak awal. Masalahnya bahwa lebih dari dua puluh delapan tahun setelah implementasi kebijakan satu anak, negara ternyata tidak lagi mampu menyediakan sistem keamanan sosial. Struktur keluarga telah berubah, dimana para kakek nenek mengambil peran lebih besar dalam urusan membesarkan anak, dan ukuran keluarga juga menjadi lebih kecil. Kondisi ini tidak akan berubah jika negara tidak mampu menghapus ketakutan para generasi tua akan adanya jaminan ekonomi setelah mereka pensiun.

Dalam banyak wilayah perkotaan, persoalan kesuburan berada pada prioritas bawah dan terjadi “aging population” yang

berarti bahwa “pengurangan dalam jumlah anak dan usia muda tidak mampu mengimbangi jumlah penduduk yang usia tua yang harus didukung oleh populasi aktif (kaum muda)”. (Scharping 2003, 328). Lutz, Scherbov, dan Sanderson berpendapat bahwa negara-negara Asia dapat mengharapkan proporsi kelompok tua dari populasi mereka, namun untuk kasus Cina, sedikit berbeda karena hampir mencapai 40 persen pada 2100 (2003, 125, 133).

Di Beijing, estimasi (2005) menempatkan populasi tua pada 13.1 persen dan tumbuh 4 persen setiap tahunna (People’s Daily Online). Mcloughlin mencatat bahwa trend ini “ khususnya kuburan semakin sedikit lebih dari 40 persen pensiunan perkotaan memiliki tempat tinggal; sementara di daerah pedesaan, proporsi sangat rendah” (Mcloughlin 2005, 308). Privatisasi negara dibawah reformasi memaksa banyak para pekerja untuk masuk dalam fase pensiun dini dan merancang peluang dimana generasi muda lebih diminati dari generasi tua. Namun perubahan ini berlangsung sangat cepat, dan menciptakan beban yang lebih besar pada generasi yang lebih muda.

Jumlah kelompok yang pensiun di Cina meningkat “dari sepuluh persen dari

total masyarakat perkotaan pada tahun 2000 menjadi 13 persen pada tahun 2010” , dan “rasio tenaga kerja berbanding pensiun dalam SOEs jatuh menjadi 2:1 di kota-kota besar (Hurst and O’Brien 2002, 353). Sebagai tambahan Hurst dan O’Brien mencatat bahwa restrukturisasi tenaga kerja bagi para pekerja yang lebih tua semakin sulit untuk mendapatkan sumberdaya yang terbatas. Kelompok yang lebih tua sering bergabung untuk melakukan protes dan demonstrasi, karena mereka merasa sebagai “penjara rumah” karena mereka kehilangan kesempatan untuk sukses. Karena peluang tenaga kerja lebih diprioritaskan kepada generasi muda, sebuah dilemma bagaimana negara mengatasi kerisauan ini dan mengurangi rasio tenaga kerja pensiun dengan tenaga kerja muda.

Kebijakan satu anak semakin sulit untuk diterapkan karena transisi demografi rendahnya kelahiran dan angka kematian. Kebijakan satu anak efektif secara temporer untuk mencapai tujuan ekonomi, menciptakan keterampilan yang lebih baik dan populasi yang lebih berpendidikan dan lebih ramping yang dapat membawa Cina pada era baru pertumbuhan. Namun, kebijakan yang tidak berimbang dalam implementasinya menyebabkan ketidakseimbangan rasio tenaga kerja bagi

Cina untuk jangka panjang dan negara harus berusaha mencari solusinya. Mengurangi ukuran populasi dalam jangka pendek memang strategi yang berguna, namun tidak untuk jangka panjang di lingkup program sosial dan ekonomi yang menyebabkan berkurangnya peran negara dalam penyediaan tenaga kerja dan keamanan sosial. Isu ini membuat ketidakpuasan masyarakat semakin berkembang bersamaan dengan kerasnya upaya negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Meskipun tekanan secara fisik tidak lagi berguna untuk menjamin terlaksananya kebijakan ini, faktor-faktor sosial ekonomi adalah faktor penting bagi masyarakat dalam memperbesar keluarga.

Beragam kesulitan yang akan dihadapi jika menambah anak, “realita yang ada menunjukkan bahwa tidak ada praktek nasional dari kebijakan satu anak, namun memiliki satu anak menjadi tujuan keluarga karena situasi negara” (McLoughlin 2005, 308). Saat ini, 19 provinsi, dimana 52 persen populasi Cina, memang sudah mengizinkan untuk memiliki dua anak (All China Women’s Federation 2007). Rendahnya persentase angka kelahiran dan pertumbuhan populasi ini ini dikarenakan adanya peningkatan biaya terhadap perawatan kesehatan dan

harapan hidup dari penerapan kebijakan satu anak. Itulah sebabnya mengapa pertumbuhan populasi terus menurun, dan banyak pasangan yang merasa tidak sanggup untuk menambah anak, dan minimnya kontrol negara dalam kehidupan sektor publik, memunculkan banyak sekali perubahan kehidupan akibat kebijakan satu anak.

Kesimpulan

Pembatasan kelahiran anak yang diberlakukan kepada pasangan-pasangan dan hanya boleh memiliki satu anak merupakan kebijakan sosial dan ekonomi yang tidak dapat diteruskan di era modern. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi pertumbuhan populasi agar Cina memiliki kesempatan untuk melakukan reformasi ekonomi dan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Beberapa dampak yang tidak perhitungkan sebelumnya muncul akibat kebijakan ini terus berkembang yakni peningkatan nilai investasi manusia yang ditempatkan pada perempuan dan membawa nilai yang lebih pada kelahiran anak-anak perempuan.

Perubahan-perubahan ini tidak muncul dengan sendirinya, selama lebih

dari 28 tahun negara secara periodik merevisi kebijakan untuk merefleksikan kebutuhan masyarakat. Menganalisa perubahan yang muncul terkait dengan sikap terhadap jenis kelamin dan ukuran keluarga adalah alasan untuk meyakini bahwa di beberapa wilayah Cina reformasi sosial masih berlangsung. Banyaknya lubang yang ditimbulkan akibat kebijakan ini memberi ruang untuk dievaluasi bahwa harusnya kebijakan ini cukup pada himbauan saja dibanding pada implementasi yang penuh dengan sanksi. Kebijakan satu anak ini membutuhkan revisi.

Referensi

Buku

- Bianco, Lucien and Chang-ming Hua. 1988. "Implementation and Resistance: The Single-Child Family Policy." In *Transforming China's Economy in the Eighties*, eds. Stephan Feuchtwang, Athar Hussein and Thierry Pairault. Boulder, CO: Westview Press, 147-168.
- Correa, Sonia. 1994. *Population and Reproductive Rights: Feminist Perspectives from the South*. Atlantic Highlands, NJ: Zed Books.
- Croll, Elizabeth. 1985. "Introduction: Fertility Norms and Family Size in China." In *China's One-Child Policy*, eds. Elizabeth Croll, Delia Davin and Penny Kane. London: MacMillan, 1-36.
- Croll, Elizabeth. 2000. *Endangered Daughters: Discrimination and Development in Asia*. New York: Routledge.
- Hershatter, Gail. 2007. *Women in China's Long Twentieth Century*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Hesketh, Therese, Li Lu and Zhu Wei Xing. 2005. "The Effect of China's One-Child Family Policy after 25 Years." *New England Journal of Medicine* 353(11): 1,171- 1,176.
- Himes, Norman. 1936. *Medical History of Contraception*. Baltimore: Williams and Wikins.
- Khan, Azizur Rahman, Keith Griffin, Carl Riskin, and Zhao Renwei. 1993. "Household Income and its Distribution in China." In *The Distribution of Income in China*, eds.

- Keith Griffin and Zhao Renwei. NY: St. Martin's Press, 25- 73.
- Kane, Penny. 1985. "The Single-Child Family Policy in the Cities." In *China's One Child Family Policy*, eds. Elisabeth Croll, Delia Davin and Penny Kane. NY: St. Martin's Press, 85-113.
- Kerr, Joanna and Julie Delahanty. 1996. *Gender and Jobs in China's New Economy*. Ottawa, Ontario: The North-South Institute.
- Knight, John and Lina Song. 1999. *The Rural-Urban Divide: Economic Disparities and Interactions in China*. Hong Kong: Oxford University Press.
- Kristof, Nicholas and Sheryl WuDunn. 1994. *China Wakes*. New York: Random House Books.
- Liang, Qiusheng and Che-Fu Lee. 2006. "Fertility and Population Policy: an Overview." In *Fertility, Family Planning, and Population Policy in China*, eds. Dudley L. Poston, Jr., Che-Fu Lee, Chiung-Fang Chang, Sherry L. McKibben, and Carol S. Walther. NY, Routledge: 8-19.
- Lu, Da-dao and V. F. S. Sit. 2001. "China's Regional Development Policies: A Review." In *China's Regional Disparities: Issues and Policies*, eds. Victor F. S. Sit and Da-dao Lu. Huntington, NY: Nova Science Publishers, Inc, 19-38.
- Mcloughlin, Caven S. 2005. "The Coming-of-Age of China's Single-Child Policy." *Psychology in the Schools* 42(3): 305-313.
- Meng, Xin. 2000. *Labour Market Reform in China*. NY: Cambridge University Press. Milwertz, Cecilia Nathansen. 1997. *Accepting Population Control: Urban Chinese Women and the One-Child Family Policy*. Surrey: Curzon Press.
- Parish, William and Sarah Busse. 2000. "Gender and Work." In *Chinese Urban Life Under Reform: the Changing Social Contract*, eds. Wenfang Tang and William L. Parish. Cambridge: Cambridge University Press, 209-231.
- Perry, Elizabeth. 1995. "Labor's Battle for Political Space: The Role of Worker Associations in Contemporary China." In *Urban Spaces in Contemporary China*, eds. Deborah

- Davis, Richard Kraus, Barry Naughton, Elizabeth Perry. NY: Cambridge University Press, 297-325.
- Perry, Susan. 1998. "Holding Up Half the Sky: Women in China." *Current History* (September): 279-284.
- Potter, Sulamith Heins. 1985. *Birth Planning in Rural China: A Cultural Account*. Working Paper 103, Women in International Development, Michigan State University.
- Potter, Sulamith Heins and Jack M. Potter. 1990. *China's Peasants: The Anthropology of a Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Riskin, Carl, Zhao Renwei and Li Shi. 2001. "The Retreat from Equality: Highlights of the Findings" In *China's Retreat From Equality: Income Distribution and Economic Transition*, eds. Carl Riskin, Zhao Renwei, and Li Shi. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 3-22.
- Scharping, Thomas. 2003. *Birth Control in China: 1949-2000*. NY: Routledge Curzon.
- Seager, Joni. 2003. *The Penguin Atlas of Women in the World*. NY: Penguin Books.
- Shanor, Donald and Constance Shanor. 1995. *China Today*. New York: St. Martin's Press.
- Shen, Qiqi. 2003. "China Taking up the Reproductive Health and Rights Agenda." *Development* 46(2): 80-84.
- Tang, Wenfang and William Parish. 2000. *Chinese Urban Life Under Reform: The Changing Social Contract*. NY: Cambridge University Press.
- Wang, Shaoguang and Hu Angang. 1999. *The Political Economy of Uneven Development: The Case of China*. Armonk, NY: M.E. Sharpe, Inc.
- Wang, Yan. 1995. "Permanent Income and Wealth Accumulation: A Cross-Sectional Study of Chinese Urban and Rural Households." *Economic Development and Cultural Change* 43(3): 523-50.
- White, Gordon, Jude Howell, and Shang Xiaoyuan. 1996. *In Search of Civil Society: Market Reform and Social Change in Contemporary China*. Oxford: Clarendon Press.

- Yang, Dennis Tao. 1999. "Urban Based Policies and Rising Income Inequality in China." *American Economic Review* 89(2): 306-310.
- Zhang, Li, Xiaotian Feng, and Qingsong Zhang. 2006. "Changing Patterns of Desired Fertility." In *Fertility, Family Planning, and Population Policy in China*. eds. Dudley L. Poston, Jr., Che-Fu Lee, Chiung-Fang Chang, Sherry L. McKibben, and Carol S. Walther. NY: Routledge, 89-109.
- Zhang, Wei-Wei. 2000. *Transforming China: Economic Reform and its Political Implications*. NY: St. Martins Press.
- Zhang, Zhen. 2001. "Mediating Time: The 'Rice Bowl of Youth' in Urban China." In *Globalization*, ed. Arjun Appadurai. Durham, NC: Duke University Press, 131-154.
- Jurnal**
- Attane, Isabelle. 2001. "Chinese Fertility on the Eve of the 21st Century: Fact and Uncertainty." *Population: an English Selection* 13(2): 71-100.
-2002. "China's Family Planning Policy: An Overview of Its Past and Future." *Studies in Family Planning* 33(1): 103-113.
- Bauer, John, Wang Feng, Nancy Riley, and Xiaohua Zhao. 1992. "Gender Inequality in Urban China." *Modern China* 18(July): 333-371.
- Brinton, Mary C., Yean-Ju Lee, and William Parish. 1995. "Married Women's Employment in Rapidly Industrializing Societies: Examples from East Asia." *American Journal of Sociology* 100(5):1,099-1,130.
- Ching C. C. 1982. "The One-Child Family in China: The Need for Psychosocial Research." *Studies in Family Planning* 13(6/7): 208-212
- Currier, Carrie Liu. 2005. "Politicizing Market Reform: Chinese Women and the State." *China Public Affairs Quarterly* 1(4): 269-292.
- Greenhalgh, Susan. 1994. "Controlling Births and Bodies in Village China." *American Ethnologist* 21(1): 3-30.

- 2001. "Fresh Winds in Beijing: Chinese Feminists Speak Out on the One Child Policy." *Signs* 26(3): 847-886.
- Hung, Jean K. M. 1995. "The Family Status of Chinese Women in the 1990s." *China Review*. Hurst, William and Kevin J. O'Brien. 2002. "China's Contentious Pensioners." *China Quarterly* 171: 345-360.
- Lutz, Wolfgang, Sergei Scherbov, and Warren Sanderson. 2003. "The End of Population Growth in Asia," *Journal of Population Research* 20(1): 125-141.
- Tien, H. Yuan. 1965. "Sterilisation, Oral Contraception and Population Control in China." *Population Studies* 27(3): 215-35.
- Tsui, Ming and Lynne Rich. 2002. "The Only Child and Educational Opportunity for Girls in Urban China." *Gender & Society* 16(1): 74-92.
- Short, Susan E. and Fengying Zhai. 1998. "Looking Locally at China's One-Child Policy." *Studies in Family Planning* 29(4): 373-387.
- Working Paper dan Laporan**
- "Chinese Government White Paper on Family Planning." *Population and Development Review* 22(2): 385-390.
- Chen, Feinian. 2005. "Residential Patterns of Parents and Their Married Children in Contemporary China: a Life Course Approach." *Population Research and Policy Review* 24(2): 125-148.
- Howell, Jude. 2000. "Organising Around Women and Labour in China: Uneasy Shadows, Uncomfortable Alliances." *Communist and Post-Communist Studies* 33: 355-377.
- Johnson, Kay. 1996. "The Politics of the Revival of Infant Abandonment in China, with Special Reference to Hunan." *Population and Development Review* 22(1): 77-98.
- Meng, Xin. 1993. "Determination and Discrimination: Female Wages in China's Rural TVP Industries," *Economics Division Working Papers no. 93(1)* (Research School of Pacific Studies, ANU): 20-22.
- Nie, Yilin and Robert J. Wyman. 2005. "The One-Child Policy in Shanghai:

Acceptance and Internationalization.” *Population and Development Review* 31(2): 313-336.

Summerfield, Gale. 1994. “Effects of the Changing Employment Situation on Urban Chinese Women.” *Review of Social Economy* 52(1): 40-59.

Zhao, Zhongwei. 2002. “Fertility Control in China’s Past.” *Population and Development Review* 28(4): 751-757.

Surat Kabar

French, Howard. 2006. “In China, Children of the Rich Learn Class, Minus the Struggle,” *New York Times*, 22 September 2006.

Website

Guan, Xiaofeng. 2007. “One-Child Policy Violators to be Put on Shame List,” *China Daily*, 2 March 2007. <http://www.chinaelections.org/en/readnews.asp?newsid5%7B45EA1DC6-0685-4738-AC21-2EBCF61695F8%7D>.

All China Women’s Federation. 2005. “China’s Household, Population, Sex Ratio, and Household Size by Region,” *Gender Statistics* 2006. <http://www.womenofchina.cn/research/statistics/16598.jsp>.

All China Women’s Federation. 2007. “Chinese Population: Family Planning Policy is Not Just the One Child Policy,” 20 April 2007. <http://www.womenofchina.cn/research/statistics/15902.jsp>.

All China Women’s Federation. 2007. “Chinese Population: Family Planning Policy is Not Just the One Child Policy,” 20 April 2007. <http://www.womenofchina.cn/research/statistics/15902.jsp>.

National Bureau of Statistics. *China Statistical Yearbooks*. <http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata>.

World Bank. 2005 *World Bank Development Indicators*. <http://devdata.worldbank>.